



Buletin Parlementaria

Nomor 1043/I/III/2019 • Maret 2019

Pemanfaatan EBT Butuh Regulasi



Penggunaan Teknologo BLK Belum Optimal

Pemanfaatan EBT Butuh Regulasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) tengah digodok di DPR RI. RUU EBT merupakan upaya yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi aturan perundang-undangan saat ini.



Foto: Ojjet Od

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjadi *Keynote Speaker* dalam FGD RUU EBT kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan LPPM Universitas Diponegoro, Semarang.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, RUU EBT ini pun menjadi langkah untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke energi baru terbarukan, semisal geotermal.

“RUU EBT ini dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya,” kata Agus saat menjadi *Keynote Speaker* dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU EBT kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/2). Hadir dalam FGD ini sejumlah civitas akademika UNDIP, Universitas Negeri Semarang, maupun pakar EBT.

Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menambahkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi. Sehingga RUU EBT ini dinilai dapat melengkapi UU yang telah ada. Untuk itu, kata Agus, berbagai pemangku kepentingan mulai dari DPR RI,

pemerintah, pengusaha dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama.

“Salah satu hal yang akan menjadi perdebatan alot adalah terkait fiskal insentif karena pasti ada beragam permintaan yang masuk. Saat ini pasokan listrik dalam negeri sebagian besar masih disuplai oleh sumber energi fosil. Padahal sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) capaian porsi EBT saat ini seharusnya sudah mencapai 16 persen agar bisa mencapai target 23 persen pada 2025,” tandasnya.

Selain ramah lingkungan, lanjut politisi Partai Demokrat itu, energi baru terbarukan juga tersedia di Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bahkan Indonesia sudah termasuk ranking nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memanfaatkan cadangan panas bumi (geotermal). Apalagi, Tanah Air yang masuk dalam *ring of fire* (cincin api). Dengan adanya RUU EBT ini pun menjadi langkah Indonesia meninggalkan energi fosil.

“Dengan capaian porsi EBT dalam bauran energi yang saat ini baru mencapai

8 persen, pemanfaatan EBT masih disebut sangat lambat. Rasio elektrifikasi pun ditaksir naik memenuhi target 96 persen pada akhir 2019. Namun regulasi yang ada justru dinilai menghambat perkembangan EBT. Kita harus segera menyelesaikan rancangan akademisnya usai FGD di UNDIP ini,” dorong legislator dapil Jateng ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, FGD RUU EBT ini merupakan upaya DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU EBT, sebagai salah satu RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pihaknya berharap melalui FGD ini beberapa persoalan mengenai poin-poin dalam RUU EBT semakin jelas. Antara lain soal insentif pembiayaan, portofolio mengenai energi baru terbarukan yang harus dirumuskan dengan baik.

“FGD ini untuk membantu Anggota Dewan dalam proses perumusan akademis RUU EBT dengan menyerap masukan dari kalangan perguruan tinggi yang konsen dengan persoalan energi baru terbarukan. Beberapa masukan yang kami himpun disini antara lain adanya masukan menjadikan RUU EBT ini *Lex Specialis*. Dalam artian untuk memberikan perlakuan-perlakuan khusus seperti perpajakan, perizinan dan sebagainya dan ini menurut saya cukup masuk akal,” urai Sensi, sapaan akrab Inosentius.

Menurutnya, RUU EBT ini strategis dan sangat dibutuhkan, karena memberikan jaminan hukum tentang hak penguasaan dan perizinan. Ia optimis RUU ini bisa selesai sebelum DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir. “Kita akan konsisten. Apa yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas dengan segala upaya kita lakukan untuk menyelesaikan sesuai target, tanpa mengabaikan kualitasnya. Kita tidak ingin karena mengejar target, lalu mengabaikan kualitasnya. Saya berharap pemerintah juga memiliki semangat yang sama dalam penyelesaian RUU ini,” tandas Sensi.

FGD RUU EBT di UNDIP ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang Prof. Zaenuri, Vice President of Renewable Energy PT. PLN Budi Mulyono, Kepala Bagian Hukum Setditjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Linda Agustina, Ketua LPPM UNDIP Prof. Heru Susanto, Pusat Studi Biomassa dan Energi Terbarukan UNDIP Prof. Hidayat, dan perwakilan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma. ■ **oji/sf**

Ketua DPR Serahkan Bantuan Alsintan Untuk Petani Kebumen



Foto: Jaka | Itr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan bantuan Alsintan pra panen dan pasca panen kepada Gapoktan se-Kabupaten Kebumen.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen dan pasca panen kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pendistribusian Alsintan adalah salah satu strategi untuk menyempurnakan manajemen teknis guna mendongkrak produksi pertanian.

“Petani juga bisa lebih nyaman mengelola lahan karena tidak perlu memikirkan pengeluaran uang untuk membeli Alsintan. DPR RI selalu memastikan agar petani terfasilitasi dengan baik, mulai dari benih, bibit, pupuk, irigasi, sampai ke pemasaran hasil pertanian. Karena saya percaya, menyejahterakan bangsa Indonesia salah satu caranya harus dimulai dengan menyejahterakan petaninya,” ujarnya saat menyerahkan bantuan Alsintan di Desa Entak, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (22/2).

Bantuan yang diberikan berupa 1 traktor roda empat, 25 traktor roda dua, 14 pompa air empat inch, 8 pompa air delapan inch, 5 *hand sprayer*, dan 5 *power thresher*. Berdasarkan data Kementerian Pertanian,

potensi lahan pengembangan pertanian padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu (PJKU) di Kebumen mencapai 45.331 hektar.

Tercatat 19 Kecamatan di Kebumen mempunyai potensi besar dalam pengembangan pertanian padi seluas 26.937 hektar. “Bahkan di tahun 2018, Kabupaten Kebumen mampu menaikkan Luas Tambah Tanam Padi dari 78.145 hektar di periode Oktober 2016-September 2017, menjadi 81.056 hektar di periode Oktober 2017-September 2018. Surplus sekitar 2.911 hektar ini menjadi bukti bahwa petani di Kabupaten Kebumen sangat tangguh,” tutur Bamsoet, sapaan akrabnya.

Bamsoet menyakini, dengan visi pembangunan Tahun 2005 – 2025, Kabupaten Kebumen mampu menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera berbasis agribisnis. Dengan demikian, Kabupaten Kebumen tidak hanya menghasilkan produk-produk pertanian saja, tetapi industri hilirnya juga akan berkembang, baik berupa industri berskala kecil menengah maupun besar.

“Melalui peningkatan program pasca panen, stabilitas harga hasil pertanian akan terjaga, lapangan pekerjaan akan terbuka, dan pendapatan daerah meningkat. Yang selanjutnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Bamsoet.

Ia menjelaskan, dalam APBN 2019, DPR RI bersama pemerintah menyiapkan hampir

Rp 4,9 triliun untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab mengurus Alsintan dan irigasi tersier. Tak hanya itu, DPR RI dan pemerintah juga menetapkan pagu subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sebanyak 9,55 juta ton atau setara dengan Rp 29,5 triliun, baik untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK maupun organik.

“Besarnya anggaran yang digelontorkan sejalan dengan misi besar Indonesia untuk menggenjot produktifitas padi dari sekitar 56,54 juta ton pada 2018 mencapai 84 juta ton di 2019, jagung 33 juta ton, kedelai 2,80 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, dan bawang putih 0,079 juta ton,” jelas Bamsoet.

Tak hanya di Kabupaten Kebumen, Bamsoet menjelaskan, pendistribusian Alsintan juga dilakukan ke berbagai daerah lainnya, khususnya daerah dengan potensi pertanian yang besar. Sudah ratusan ribu traktor yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada para Gapoktan, hendaknya bisa dirawat dengan baik. Jangan sampai bantuan tersebut menjadi sia-sia. Karena yang rugi bukan hanya para petani, melainkan juga bangsa Indonesia,” pungkas Bamsoet. ■ jk/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara

Konstitusi Baru Kuba Perkuat Relasi

Kuba memproklamkan konstitusi barunya kepada dunia. Bila dahulu negara ini begitu tertutup (inklusif), kini telah membuka diri (eksklusif) terutama terhadap investasi asing. Perkembangan mutakhir menyangkut konstitusi baru ini telah membuka jalan relasi Indonesia yang lebih kuat dengan negara yang pernah dipimpin Fidel Castro itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2). Dengan konstitusi baru ini, banyak investasi asing masuk. Hampir semua negara ASEAN sudah menanamkan investasinya di Kuba, kecuali Indonesia yang belum sama sekali.

“Dubes Kuba menyampaikan perkembangan terbaru di negaranya yang baru saja memiliki konstitusi baru. Konstitusi baru ini disetujui 87 persen warga negaranya. Dengan konstitusi baru ini, membuka peluang relasi yang lebih kuat lagi dengan Kuba. Kita tahu Kuba ini negara yang agak tertutup sebelumnya,

karena pemerintahannya sosialis. Artinya, kepemilikan negara sangat dominan,” ungkap Fadli dalam wawancaranya usai pertemuan.

Konstitusi baru, relasi baru, itulah yang kini terjadi di Kuba. Negara sosialis yang tertutup ini berani membuka diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Khusus di bidang investasi, dunia internasional menyambut positif perkembangan di Kuba ini. Invesatsi mengalir deras seiring konstitusi baru yang sudah diberlakukan. Tak ketinggalan negara-negara ASEAN seperti ikut berlomba menanamkan modalnya di negara yang berada di Kawasan Karibia ini.

“Karena hubungan Kuba-Indonesia sudah sangat lama, mereka ingin ada investasi dari Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti

Thailand, Laos, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, kita termasuk yang paling terbelakang dalam hubungan investasi dengan Kuba. Mereka berharap investasi Indonesia bisa masuk. Negara-negara ASEAN lain sudah masuk, bahkan Singapura sudah bikin hotel. Tapi, Indonesia belum ada sama sekali,” jelasnya.

Sejak tahun 1960-an, Indonesia-Kuba sudah membangun relasi politik yang sangat kuat. Mending Presiden pertama Indonesia Soekarno telah meletakkan poros sekaligus pondasi relasi dengan pemerintah Kuba yang waktu itu masih dipimpin mending Fidel Castro. Kini, di era modern, Indonesia-Kuba perlu melebarkan sayap relasi ke ranah investasi yang saling menguntungkan kedua negara.

Menurut Fadli, ini langkah maju Kuba yang telah mengamandemen konstitusinya. Investasi dari Indonesia pun sangat dinanti Kuba. “Konstitusi baru membuka ruang investasi baru bagi swasta dan asing. Dampaknya terhadap relasi dengan Indonesia lebih terbuka. Sebelumnya *enggak* bisa. Sekarang mereka membuka diri. Kuba, kan, dianggap negara yang tertutup sebelumnya terhadap investasi asing. Ini perkembangan baru dan merupakan langkah Kuba yang sangat maju,” nilai politisi Partai Gerindra itu. ■ mh/sf

Anggaran Pengamanan Pemilu Harus Disamakan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menekankan, anggaran fungsi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 antara TNI dan Polri harus disamakan. Pihaknya berharap tidak ada perbedaan besaran anggaran di antara kedua institusi yang akan mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini. Pihaknya optimis, TNI akan bekerja sama dengan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

“Kami harap agar indeksnya tidak berbeda jauh, atau bisa disamakan. Sehingga uang maknanya akan bertambah, karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni mendukung pengamanan Pemilu 2019,” jelas Satya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam IV/Diponegoro beserta jajaran dan Pejabat Mabes TNI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/2).

Legislator Partai Golkar itu menilai Kodam IV/Diponegoro telah konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, karena tuisi pengamanan Pemilu itu sama dengan operasi militer selain perang. Ia berharap TNI dapat mendukung pengamanan Pemilu dengan baik. Komisi I DPR RI pun yakin, TNI dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019 mendatang.

Terkait pertemuan Komisi I DPR RI

dengan mitra kerjanya, khususnya TNI, yang diinterpretasikan TNI menjadi tidak netral, Satya meminta hal itu jangan menjadi penghambat menjelang Pemilu ini. “Kami menjalankan tugas sebagai Komisi I DPR yang harus berdekatan dengan semua mitra kerjanya. Tapi saya ingatkan juga ke Pangdam, apabila akan berinteraksi bisa diterima secara resmi, tanpa ada kecurigaan,” tutupnya. ■ cas/sf

Kodam IV/Diponegoro telah konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, karena tuisi pengamanan Pemilu itu sama dengan operasi militer selain perang.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I,

Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Amanda Prihandini,

S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske

Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli

Singih Rimbani Kinanti, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Anrimi

Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,

Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,

Puntho Pranowo,

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah

Gerald Opie,

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,

Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,

Safitri Restu Widayawati, SIP,

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Komisi I Dukung Peningkatan Anggaran Alat Kelengkapan TNI

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi memberikan dukungan pada peningkatan anggaran alat kelengkapan yang akan digunakan Kodam II/Sriwijaya untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan alokasi anggaran yang disampaikan Pangdam II/Sriwijaya. Bobby memastikan, dukungan itu akan diupayakan jika nantinya ada pembahasan RAPBN-Perubahan 2019.

“Kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI, kiranya apakah memang sudah ada alokasi yang cukup memadai dan bisa untuk memastikan kesiapan operasi di lapangan,” jelas Bobby usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam II Sriwijaya, para Danrem dan Dandim berserta jajarannya, di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (18/2).

Selain anggaran, Bobby turut menyoroti kondisi Kota Palembang menjelang Pemilu yang dinilai saat ini cukup kondusif. Ia berpendapat Kota Palembang akan tetap kondusif selama Pemilu berlangsung, mengingat hal

tersebut sudah teruji pada Pilkada 2018 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, dengan tidak adanya konflik antar kelompok pendukung paslon gubernur dan walikota yang menyebabkan kondisi keamanan di level kritis.

“Jadi Kodam Sriwijaya ini dikatakan bahwa daerah di bawah wewenangnya itu termasuk yang risikonya itu sedang saja dan sudah pernah teruji dalam Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan, yaitu Pilkada 2018. Terbukti sudah tidak ada lagi konflik komunal atau antar paslon yang kiranya signifikan” tandas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Bobby juga meminta agar Kodam II/Sriwijaya untuk terus berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Kepolisian dalam mengawal Pemilu 2019, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani apabila terdapat tindak pidana Pemilu. “Melihat kesiapan, baik



Foto: Tasya/rni

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi

itu formasi personel maupun koordinasi dengan instansi lain termasuk dengan Polisi dan Gakkumdu, Kodam Sriwijaya ini bisa dikatakan sudah dalam posisi siap untuk mengamankan Pileg dan Pilpres di wilayah lingkup Kodam Sriwijaya” ujar Bobby.

Legislator dapil Sumsel II ini berharap TNI bisa menjaga netralitasnya dalam menjalankan tupoksinya. Ia pun meminta agar TNI dapat memastikan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan Pemilu berjalan aman dan adil hingga perhitungan suara selesai. ■ nap/sf

Pelayanan Pemerintahan Ibu Kota Maluku Belum Fungsional

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menilai, sejak dipindahkannya Ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi beberapa tahun yang lalu, hingga saat ini pelayanan pemerintahan di Sofifi masih belum fungsional.

Padahal telah banyak anggaran yang dikucurkan untuk membangun infrastruktur dan di wilayah Sofifi tersebut.

“Saat ini Kantor Gubernur Maluku Utara sudah berada di Sofifi, Kabupaten Tidore. Tetapi sampai sekarang pelaksanaan pemerintahan di Sofifi belum fungsional. Sudah lebih dari 5 tahun,



Foto: Devi | Hr

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja.

Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menegaskan, kepala daerah harus membantu pemerintah, khususnya kementerian yang mengerjakan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan.

Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah pun selayaknya mendapat apresiasi.

Demikian diungkapkan Jhoni saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dan beberapa mitra kerja terkait di Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Peran Pemkab Simalungun dalam membantu pembangunan infrastruktur cukup mendapat sorotan Komisi V DPR RI.

“Pembebasan lahan oleh kepala daerah untuk pembangunan jalan, sungai, jembatan dan pelabuhan untuk mempercepat proses pembangunan tentunya harus diapresiasi. Kepala daerah bisa diberikan *reward and punishment* oleh mitra kerja kita. Kepala daerah yang kurang bekerjasama pun dapat diberikan *punishment*,” kata legislator Partai Demokrat itu.

Menurut Jhoni, program infrastruktur pemerintah pusat tidak boleh terhambat

fungsi pelayanan pemerintahan masih dijalankan di Ternate,” ucap Hakam disela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Maluku Utara, Kamis (14/2).

Hakam sangat menyayangkan atas kondisi yang ada tersebut. Menurut Hakam, seharusnya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena sudah banyak sekali anggaran yang dikucurkan untuk membangun perkantoran di Sofifi, namun pada kenyataannya tidak fungsional dan tidak terpakai,” tuturnya

Dalam kesempatan yang sama, politisi Fraksi PAN itu juga menyoroti tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghadapi Pemilu 2019. Ia menilai, penyelesaian pembuatan KTP-Elektronik (KTP-el) yang menjadi syarat wajib untuk menjadi peserta

Kepala Daerah Harus Bantu Percepat Proses Pembangunan



Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun meninjau proyek infrastruktur di Simalungun

akibat kepala daerah yang kurang bekerjasama. Jika ada hambatan dalam pembebasan lahan, menurutnya bisa menginformasikan kepada Komisi V DPR RI. “Sehingga kami bisa menjembatani tokoh masyarakat apabila ada hambatan untuk pembebasan lahan,” tandas legislator dapil Sumut itu.

Diketahui, koordinasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemkab Simalungun kurang harmonis. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI berharap pemkab setempat bisa ‘menjemput bola’ seperti pemda lainnya. Karena jika peraturan daerah pembangunannya belum dikeluarkan, maka Ditjen Cipta Karya tidak dapat melaksanakan pembangunan. ■ **eno/sf**

pemilu masih belum mencapai target.

“Di Kota Ternate saja baru 80 persen warga masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik. Artinya, masih belum seluruhnya warga yang mempunyai KTP Elektronik di Kota Ternate, meskipun dari Dinas Dukcapil Provinsi Maluku menyatakan sudah 90 persen warga yang telah dilakukan perekaman,” paparnya.

Dikatakannya, dengan kekurangan 10 persen atau sekitar 80 ribu orang yang

“Saat ini Kantor Gubernur Maluku Utara sudah berada di Sofifi, Kabupaten Tidore. Tetapi sampai sekarang pelaksanaan pemerintahan di Sofifi belum fungsional. Sudah lebih dari 5 tahun, fungsi pelayanan pemerintahan masih dijalankan di Ternate,”

seharusnya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik.

masih belum melakukan perekaman KTP-el, menjadi pertanyaan bagaimana mereka sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih. “Padahal pada Pemilu 2019 ini, warga negara yang mempunyai hak untuk memilih tersebut harus mempunyai KTP-Elektronik. Ini menjadi satu catatan buat kami,” tegasnya.

Terkait hal itu, Hamka menyatakan, Komisi II DPR RI akan memanggil Kemendagri untuk diminta keterangan serta tindak lanjutnya agar masalah ini bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. ■ **dep/sf**

Foto: Kresno | Hr

Komisi II Ingatkan Hak Pilih Warga Perbatasan

Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya mengingatkan hak pilih warga yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pasalnya, tak sedikit masyarakat perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang belum memiliki KTP-Elektronik.

“Dari hasil laporan pemerintah daerah sudah lumayan bagus, namun yang menjadi persoalan bahwa masih banyak penduduk perbatasan di Kaltara yang belum mempunyai NIK,” ungkap Eddy di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan jajaran di Kaltara, baru-baru ini.

Menurut politisi dari F-PDI Perjuangan ini, penduduk perbatasan rentan administrasi kependudukan karena faktor geografis dan kondisi wilayah tersebut. Selain itu, karena lebih dekat dengan Malaysia, tak jarang mereka memiliki identitas kependudukan Malaysia.

“Mereka adalah masyarakat perantau

kebanyakan dari Sulawesi dan jadi imigran ke Malaysia tidak dilengkapi dengan surat-surat administratif. Pulang dari Malaysia mereka tinggal di pedesaan-pedesaan di Kaltara ini, sehingga belum terdaftar secara administrasi pemerintahan maupun kependudukan,” sambung Eddy.

Menurutnya, hal ini memerlukan kerja keras dari pemerintah daerah untuk kembali mendaftarkan masyarakat yang tinggal di daerah terluar. “Kita akan dorong Menteri Dalam Negeri untuk segera mendaftarkan lagi agar mereka dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu mendatang,” jelasnya.

Kendati demikian, Eddy mengapresiasi

penduduk perbatasan rentan administrasi kependudukan karena faktor geografis dan kondisi wilayah tersebut. Selain itu, karena lebih dekat dengan Malaysia, tak jarang mereka memiliki identitas kependudukan Malaysia.



Foto: Anne | Hr

Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya

Kaltara dalam mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan 97 persen warga yang dari 643.253 jiwa penduduk Kaltara telah melakukan perekaman KTP-el.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Samuel Parangan mengatakan berbagai upaya masih terus dilakukan, diantaranya kegiatan ‘jemput bola’ untuk perekaman KTP-el, dengan melakukan penyisiran hingga ke daerah perbatasan dan pedalaman. ■ ann/sf

Hakim Karir Diprioritaskan Jadi Hakim Agung

Para hakim karir idealnya mendapat prioritas untuk menjadi hakim agung. Sejauh ini hakim non karir masih dominan mengisi kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung.

Para hakim karir ternyata juga enggan menjadi calon hakim agung lantaran terganjal banyak persyaratan yang diadakan Komisi Yudisial (KY). “Itu jadi perhatian kami bahwa hakim-hakim dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sedikit sekali yang menjadi hakim agung. Kita harus beri



Foto: Anedri | Hr

Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengutuk keras pelaku tindak kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi.

Ia meminta agar pelakunya ditindak secara tegas hingga menimbulkan efek jera. Seperti yang diketahui akibat perburuan liar, satwa langka yang dilindungi jumlahnya saat ini semakin berkurang bahkan cenderung punah. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar para satwa langka ini, nantinya bisa diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai suatu kekayaan alam yang tersedia di alam Indonesia ini.

“Harus ada kebijakan yang tepat untuk mengelola hutan lindung kita berikut seluruh makhluk hidupnya. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan ketat yang tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, tapi juga menggunakan sistem satelit. Sehingga nantinya lokasi satwa langka itu dan lokasi orang untuk memburu itu bisa terdeteksi. Jadi harus ada semacam peringatan dini terhadap satwa langka yang menjadi target perburuan,” jelas Hermanto saat bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau hasil perburuan satwa langka oleh pelaku kejahatan, di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (14/2).

Selanjutnya jelas Hermanto, harus ada prinsip bagaimana hal ini menjadi tugas

motivasi agar hakim-hakim itu berminat menjadi hakim agung,” kata Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/2).

Ketua Pengadilan Negeri Palembang, saat mengikuti pertemuan dengan Komisi III DPR RI mengungkapkan, 60 persen calon hakim agung diambil dari non karir. Masa depan para hakim karir telah dipatahkan oleh KY. Ketua PN Palembang ini mencontohkan, KY pernah menyeleksi calon hakim agung dengan melihat rumah para hakim karir yang dinilai mewah, lalu mencoretnya dari daftar calon.

KY pernah menyeleksi calon hakim agung dengan melihat rumah para hakim karir yang dinilai mewah, lalu mencoretnya dari daftar calon.

Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Satwa Langka



Tim Kunjer Reses Komisi IV DPR RI meninjau hasil perburuan satwa langka di Medan, Sumatera Utara (Sumut)

Foto: Husen I/hr

negara untuk melestarikannya, agar nantinya satwa langka yang dilindungi ini bisa tumbuh berkembang. Salah satunya perlu adanya lahan yang memungkinkan satwa langka tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Hal ini penting sebagai suatu upaya pencegahan

kerusakan lingkungan, karena habitat satwa langka perlu dipelihara dan dijaga.

“Misalnya seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan, banyak kasus satwa yang keluar dari habitat mereka dan masuk ke dalam ranah masyarakat. Bisa saja habitat mereka di hutan itu stok makanannya sudah habis, sehingga mereka mencari makanan di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi pemerintah harus memikirkan bagaimana menghidupkan kembali habitat para satwa langka yang sudah rusak,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Oleh karena itu Hermanto mengimbau agar pemerintah harus menjaga serta memelihara hutan sebagai habitat para satwa langka melalui tiga prinsip. Yaitu prinsip pengawasan, prinsip kebijakan dan juga prinsip pelestarian. Terkait regulasi, dirinya menilai regulasi yang ada saat ini sudah bagus, hanya aspek pelaksanaan yang harus lebih ditingkatkan.

“Regulasi yang ada saat ini sudah bagus, hanya sekarang tinggal ketegasan dari pelaksana Undang-Undang, mau tidak menindak tegas pelaku kejahatan satwa langka. Saya yakin jika ini diterapkan secara tegas nantinya akan kasus pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi tersebut akan berkurang,” harap politisi daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Menurut politisi Partai Golkar itu, persoalan seperti itu ternyata tidak prinsipil. Ironis, fisik rumah calon malah dijadikan standar rekrutmen hakim agung oleh KY. “Saya berharap ada masukan bagi KY tentang persyaratan hakim agung. Sekarang ini lebih banyak hakim non karir daripada hakim karir yang jadi hakim agung. Ini jadi problema kita,” tandas mantan advokat itu.

Ditambahkannya, yang justru harus diprioritaskan adalah hakim-hakim karir dalam seleksi calon hakim agung. Pasalnya, mereka sudah mendalami pembuatan putusan dan menilai kebenaran fakta di persidangan. “Perbandingan kuota hakim karir dan non karir akan kita pelajari. Jangan sampai hakim agung itu didominasi hakim non karir. Saya pribadi lebih memprioritaskan hakim karir di MA,” akunya lebih lanjut.

■ mh/sf

■ tra/sf



Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil

“Jadi ketika ada tindakan yang tidak profesional, tentunya akan menggerus kepercayaan publik kepada institusi yang bersangkutan, kemudian akan merugikan banyak orang,” ujar Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum Jatim, di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (18/2).

Foto: Suci | Hlr

Profesionalisme Jadi Tantangan Aparat Penegak Hukum

Tantangan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga peradilan itu adalah soal profesionalisme. Karena profesionalisme ini menyangkut bagaimana aparat penegak hukum mengorganisir kewenangan-kewenangan yang mereka miliki.

Oleh karenanya, ia melihat laporan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Luki Hermawan terkait dengan berbagai pelanggaran profesionalisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian, itu cukup besar. Di tahun 2018 ada 65 pelanggaran dalam bentuk tidak profesional dalam penyidikan, di Januari sampai Februari 2019 ada 19 pelanggaran.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur karena berani mencantumkan hal tersebut dalam laporannya kepada Komisi III DPR,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Nasir, tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menghadirkan profesionalisme dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Sehingga ke depan penegakan hukum bisa berjalan objektif, bertanggungjawab, transparan, dan memberikan keadilan kepada orang yang diselidiki tersebut.

Kemudian bagaimana juga hakim, benar-benar memiliki kemandirian dan kemerdekaan dalam melihat dan mendengar fakta-fakta di persidangan. Kasus apapun, baik kasus yang melibatkan anak-anak, perempuan, ataupun kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia maupun kasus terkait yang saat ini marak, yaitu soal prostitusi *online*.

“Jadi harapan kami mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan bisa benar-benar mengukuhkan profesionalisme dalam tugas dan pengabdianya,” tandas politisi dapil Aceh itu. ■ **sc/sf**

Perlu Kerja Sama Tingkatkan Layanan Bandara Sam Ratulangi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi adanya penurunan penumpang maupun kargo yang signifikan di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun menekankan perlu kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, seperti pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait, agar kemudian hari kehadiran wisatawan atau arus kargo bisa memberikan dampak yang positif bagi bandara ini.

“Walau pelabuhan atau bandaranya sudah bagus, tetapi wisatanya kurang menarik, akan tetap sulit untuk mendapatkan pengunjung. Semua harus menjadi suatu sistem,” jelas Adang saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelindo IV, dan

PT. Telekomunikasi Indonesia, di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (14/2).

Selain itu, dalam kesempatan ini PT. Garuda Indonesia juga menginisiasi adanya penambahan empat kargo penerbangan untuk keperluan logistik, seperti untuk pengiriman tuna dan kerapu ke Jepang. “Saya pikir tinggal bagaimana direksi atau pimpinan Garuda untuk bisa memanfaatkan apapun juga, baik dari kargo ataupun penumpang. Kita berharap peningkatan kargo untuk pengangkutan tuna itu dapat meningkatkan keuntungan,” ujar Adang.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, adanya penurunan penumpang dan kargo di Bandara Sam Ratulangi Manado ini, perlu



Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun

perhatian khusus dari BUMN terkait dan pemda. “Manado harus mampu membuat wisatawan asing, terutama dari Tiongkok, Taiwan, dan Korea untuk bisa masuk. Sehingga mampu bersaing dengan Bali, dalam hal wisatawan internasional,” tutup Adang. ■ **ica/sf**

Foto: Larissa | Hlr



Foto: Elio | Hr

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah bersama Kelompok Tani Haley Kampung Yobeh Distrik Sentani

Pelaku Budi Daya Sagu Butuh Alat Pengolahan

Sagu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua. Banyak orang Papua besar karena sagu. Di sekolah, anak-anak Papua makan sagu kering, karena orang tuanya membekali sagu dan ikan bakar.

Sagu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua. Banyak orang Papua besar karena sagu. Di sekolah, anak-anak Papua makan sagu kering, karena orang tuanya membekali sagu dan ikan bakar. Sagu bisa menjadi alternatif ketahanan pangan lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah menyadari hal itu. Ia mendorong pemerintah memberikan bantuan alat pengolahan sagu yang mumpuni kepada pelaku budi daya sagu di Papua.

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Papua, Sulaeman menerima aspirasi dari unit pengelolaan hasil sagu Kelompok Tani Haley Kampung Yobeh Distrik Sentani, para petani sagu mengeluhkan alat yang terbatas dalam

mengolah sagu. Melihat masalah ini, ia memastikan akan bersinergi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian untuk penyediaan mesin pengolah sagu yang sesuai dengan kebutuhan.

“Mesin rekayasa yang dikembangkan oleh Made Budi dibutuhkan masyarakat. Karena bantuan yang lama tidak bisa digunakan, tidak cocok karena terlampau kecil dan bukan untuk pengolahan sagu. Kami sama-sama bersinergi. Saya sebagai wakil rakyat dari Papua dengan Ditjen Perkebunan, kami sama-sama mengawal kepentingan masyarakat,” papar Sulaeman di Distrik Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (15/2).

Diketahui, salah satu peneliti Universitas

Cendrawasih Jayapura I Made Budi telah menciptakan mesin pengelolaan sagu guna memudahkan masyarakat Papua mengelola sagu. Pembuatan mesin itu sudah dilakukan sejak lima tahun lalu dan dijual kepada masyarakat lokal. Menurutnya, masyarakat yang membeli produknya mengaku mesin pengelolaan yang diciptakannya dapat diterima dan sangat cocok digunakan mengelola sagu.

Legislator Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi IV DPR RI memberikan dorongan dan mendukung kepada pelaku budi daya tanaman sagu agar tetap eksis dalam melaksanakan budi daya. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

Sulaeman mengatakan budaya masyarakat mengkonsumsi sagu patut dilestarikan ditopang dengan produksi sagu yang baik. “Dengan potensi yang begitu besar diharapkan keadaan ini bisa berubah sesuai dengan cita-cita masyarakat. Penanganan teknis dalam hal pengelolaan sagu bagian dari tanggung jawab kita untuk melestarikan sagu,” tandas legislator dapil Papua itu. ■ **eko/sf**

Pelabuhan Mamuju Diusulkan Jadi Pelabuhan Rakyat

Anggota Komisi V DPR RI Rendy Affandi Lamadjido mengusulkan Pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat diubah fungsinya menjadi pelabuhan rakyat. Sehingga, pelabuhan ini akan menjadi lokasi berlabuh, serta masuk dan keluarnya perahu dan kapal dari pulau lain.

Sementara Pelabuhan Belang-Belang yang lokasinya juga di Mamuju dapat dijadikan pelabuhan kontainer.

“Saya kira di Sulbar ini kondisinya memiliki banyak pulau-pulau. Jadi memang (pelabuhan rakyat) sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita buka pelabuhan untuk rakyat, (harapannya) akan maju,” kata Rendy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Mamuju di Sulbar, Kamis (14/2).

Politisi F-PDI Perjuangan ini mencontohkan Pelabuhan Kali Adem di Jakarta yang merupakan pelabuhan rakyat.



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat meninjau Pelabuhan Mamuju di Sulbar

Sementara Pelabuhan Tanjung Priok dimanfaatkan untuk pelayanan kontainer dan ekspor impor. Menurut Rendy, nantinya yang akan menjadi penumpang di Pelabuhan Rakyat Mamuju kebanyakan dari pulau-pulau di Sulbar maupun wilayah lain.

“Jadi memang Pelabuhan Mamuju ini diperuntukkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jadi misalnya dari Makassar ke Mamuju untuk kalangan bawah ada transportasinya. Nah sementara jika naik pesawat kan untuk kalangan menengah ke atas,” analisa legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah ini. ■ **jk/sf**



Foto: Jaka | Hr



Foto: Arief | Hr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana meninjau gudang Bulog

Belum Ada Koordinasi Akomodir Hasil Pertanian

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, belum ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) serta pemerintah daerah penghasil pangan terkait potensi hasil panen petani terutama di daerah-daerah.

“Harus ada koordinasi, jangan sampai kita tidak tahu bahwa ada potensi ekspor, namun di sisi lain kita impor komoditas yang sama,” tegas Azam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Bulog Divre di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/2).

Informasi yang didapat Azam, Sulbar memiliki potensi jagung dan kedelai yang sangat besar. Yang mana hasil panen kedua komoditas tersebut bisa mencapai angka 400 ribu ton dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun sangat disayangkan, informasi ini belum terkoordinir dengan baik oleh Bulog dan kementerian terkait.

Kepada Asisten II Pemprov Sulawesi Barat, legislator Partai Demokrat menyampaikan bahwasanya Bulog bisa menyerap hasil panen masyarakat dengan catatan harganya harus stabil dan sesuai dengan kesepakatan. Tidak bisa bila harganya sedang melambung tinggi, hasil panen petani dijual ke luar.

“Saat harga turun Bulog disuruh beli, ini kan tidak *fair*. Jadi sebenarnya kalau harga stabil, petani itu tetap diuntungkan. Harga naik dibeli tinggi, harga turun pun juga dibeli tinggi. Bila harga sedang naik, maka akan dibeli sesuai dengan kesepakatan agar seluruh pihak yang terlibat diuntungkan,” papar Azam.

Azam menekankan pentingnya koordinasi serta sinkronisasi data yang akurat antar pemangku kepentingan. “Macam-macam permasalahan lintas sektor ini harus dikoordinasikan. Sekarang kelihatannya belum ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah, sehingga membingungkan masyarakat kecil,” pungkas legislator dapil Jawa Timur III itu. ■ **afr/sf**



Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendorong Pemprov Sumbar untuk memperbaiki sistem pelatihan dan peralatan yang digunakan BLK.

“Itu pun saya menduga tidak terserap di sektor-sektor yang lebih baik. Artinya terbatas pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kenapa demikian? Karena

Lulus BLK Sumbar Hanya 40 Persen Terserap Dunia Kerja

Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Badan Latihan Kerja (BLK) dengan jumlah peserta mencapai 16 ribu orang. Namun berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, dari 16 ribu peserta itu, baru sekitar 40 persennya yang terserap dunia kerja.

memang pelatihan tersebut sengaja dibuat tidak untuk level pekerjaan yang lebih tinggi,” ujar Marinus usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, materi, kurikulum serta peralatan yang digunakan di BLK ini sangat tertinggal. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatihpun ikut tertinggal. Terlebih lagi dengan pencanangan industri 4.0 dengan teknologi yang sangat cepat. Mengambil istilah anak *jaman now*, peralatan di BLK sudah *jadul*.

Marinus meminta semua itu tentu

harus diperbaiki dan ditingkatkan. Mulai dari materi pelatihan, kurikulum, serta semua peralatan yang digunakan di BLK harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga SDM yang dihasilkan BLK juga merupakan tenaga kerja siap pakai di industri besar maupun industri menengah.

“Kami mendorong agar BLK segera memperbaiki cara mengajar, sistem dan kurikulum pengajaran, serta peningkatan berbagai alat pendukung. Di sini saya menyarankan agar jangan bicara secara sektoral, namun menyeluruh dan terintegrasi dengan instansi lainnya,” tambah legislator dapil Banten III itu.

■ ayu/sf

Komisi VI Dorong BUMN Perbankan Bina UKM



Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli tinjau Desa Wisata Batik Kliwonan, Sragen

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan untuk membantu permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia pun meminta agar bunga KUR tidak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan para debitur. Selain itu, pembinaan dan pelatihan dari perbankan kepada pelaku UKM dalam mengembangkan produknya juga dirasa penting.

“Kalau tidak ada pelatihan, pelaku UKM terkadang salah sasaran. Jadi pelatihan itu misalnya bagaimana pelaku UKM dapat membuat warna dan corak batik yang lagi tren. Misalnya batik yang mau diekspor ke Eropa, tren warnanya seperti apa, jadi jangan salah membuat warna dan corak batik,” kata Melani saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau UKM batik yang mendapat bantuan permodalan dari Bank Negara Indonesia (BNI) di Desa Wisata Batik Kliwonan,

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih banyak melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Melihat kondisi ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam lawatannya ke Pertamina Kilang Refinery Unit (RU) VII Kasim Sorong meminta pemerintah untuk meningkatkan produksi BBM dengan mengoptimalkan refinery atau kilang minyak yang ada.

Apalagi kilang minyak di Indonesia sudah stagnan sejak 1995 dan sudah tidak ada lagi pembangunan kilang baru.

“Kilang Pertamina Kasim ini merupakan kilang terakhir dan yang paling muda yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 1995. Sudah berganti-ganti Presiden, tapi belum ada kilang baru. Akibat ketidakseriusan pemerintah meningkatkan produksi, pemerintah terlalu mengandalkan impor BBM untuk mencukupi kebutuhan yang setiap tahunnya jumlah impor minyak selalu meningkat,” tandas Wakil Ketua Komisi VII

Sragen, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, setelah diberi bantuan pelatihan, BUMN perbankan juga bisa membantu dalam pengemasan dan memasarkan produk yang dihasilkan UKM. Pemasaran melalui pameran diharapkan dapat mendongkrak penjualan produk UKM. Menurut Melani, dengan mengikuti pameran, para pelaku UKM dapat mengetahui tren-tren produk terbaru, termasuk melihat perkembangan pangsa pasar.

“Penting sekali produk UKM untuk diikutsertakan pada pameran. Dengan

“Penting sekali produk UKM untuk diikutsertakan pameran. Dengan diikutsertakan pameran, selain dia bisa menjual barang, dia juga bisa melihat pangsa pasar orang yang ada. Jadi, pelaku UKM ini harus mengetahui dimana pangsa pasarnya berada.

Komisi VII Minta Pemerintah Serious Tingkatkan Produksi BBM



Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Kilang RU VII Kasim, Sorong

Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Kilang RU VII Kasim, Sorong, Jumat baru-baru ini.

begitu diikutsertakan pameran, selain dia bisa menjual barang, dia juga bisa melihat pangsa pasar orang yang ada. Jadi, pelaku UKM ini harus mengetahui dimana pangsa pasarnya berada. Jangan sampai salah pasar. Misalnya pangsa pasarnya kelas atas, dia malah memasarkannya untuk kelas bawah atau sebaliknya. Jadi sebelum dia ikut pameran, dia juga harus mengetahui produknya ini diterima dimana,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta II ini.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan BNI Kantor Wilayah Yogyakarta Andy Yusdiman memaparkan, BNI menyalurkan KUR kepada 22 debitur dengan nilai KUR mencapai Rp 9 miliar di Sragen. Sementara di Solo, BNI menyalurkan KUR kepada 42 debitur dengan nilai KUR mencapai Rp 27 miliar. “Kita selalu ada pelatihan kepada UKM. Kalau kita buat klaster, itu ada 1 paket pendampingan. Kita mulai masuk dari Mitra, kemudian ke KUR. Jika debitur mengambil KUR lebih dari Rp 500 juta, kita arahkan ke BNI Wirausaha,” jelas Andy. ■ sf

Komisi VII DPR RI sangat berharap pemerintah bisa merevitalisasi dan optimalisasi Kilang RU VII Kasim karena bisa memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia Timur, baik di Maluku maupun di Papua, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga. “Pemerintah harus bisa mengoptimalkan Kilang Pertamina Kasim. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) harus mendesak Pertamina untuk menemukan sumber minyak mentahnya,” tutur legislator Partai Golkar itu.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang menuturkan Pertamina sudah berupaya dalam meningkatkan produksi minyak dan untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia bagian timur dengan program BBM satu harga. “Jika kita melihat kebutuhan BBM di Papua telah ditetapkan BBM satu harga, alhamdulillah sampai saat ini bisa mencapai BBM satu harga,” tutur Ignatius.

GM Pertamina RU VII Kasim Edy Januari Utama menambahkan, Kilang Kasim Sorong memiliki kapasitas 10.000 barel per hari, namun saat ini beroperasi dengan kapasitas 6.500 barel per hari. Kapasitasnya bisa ditingkatkan kapasitasnya karena masih ada kapasitas kilang yang belum dimanfaatkan sebesar 3.500 barel per hari. “Kendala saat ini adalah ketersediaan crude yang masih dipasok dari tiga tempat yaitu Petrogas, Pertamina EP, dan Mountdown,” tutur Januari. ■ rh/sf

Bali Butuh Pembangkit Energi Ramah Lingkungan



Foto: Andri/rni

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII berfoto bersama usai melakukan pertemuan dengan jajaran mitra kerja, di Provinsi Bali

Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase menilai, Provinsi Bali memiliki pertumbuhan kebutuhan energi listrik sangat tinggi melebihi rata-rata nasional. Di samping pemakaian masyarakat umum, pertumbuhan sektor jasa pariwisata di Bali sangat memerlukan ketercukupan pasokan energi listrik yang bisa diandalkan secara keberlanjutan.

Di sisi lain, kenyataan Bali tidak memiliki sumber daya konvensional seperti minyak, gas, dan batubara sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk itulah, Ferry menilai pemanfaatan energi baru terbarukan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mengunjungi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di Kepulauan Riau.

Komisi VIII Serap Aspirasi Penerima PKH

Marwan memberikan kesempatan kepada para pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait dengan pekerjaan yang dijalani.

“PKH ini tentu akan terus ada selama ada kemiskinan. Pemerintah akan melakukan intervensi supaya masyarakatnya tidak terlanjar kemiskinan,” tegas Marwan usai memimpin dialog Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan pendamping PKH dan TKSK di Kampung Tua Bagan, Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, politisi PKB itu mendorong kepada para pendamping PKH untuk menciptakan usaha yang dapat memperbaiki ekonomi para penerima PKH dengan memanfaatkan modal Kelompok Usaha Bersama



Foto: Naitan/rni

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI mengunjungi keluarga penerima manfaat PKH di Kepulauan Riau

yang walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, diharapkan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Bali.

“Untuk mencapai Bali Mandiri Listrik, perlu terobosan baru. Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan juga akan mendukung sektor pariwisata, kebutuhan kelistrikan terpenuhi, lingkungan tetap bersih dibanding memanfaatkan batu bara,” ujar Ferry saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Bali, baru-baru ini.

Ferry menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Bali akan segera mengagendakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali dan segera menerbitkan Pergub tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Bersih di Provinsi Bali.

Ke depan, sudah seharusnya pemanfaatan energi terbarukan menjadi solusi energi bagi daerah di Indonesia guna menyiasati menipisnya cadangan sumber daya konvensional. Politisi Hanura ini menyatakan harapan adanya tarif energi yang terjangkau di seluruh daerah di Indonesia, untuk itulah pemanfaatan energi terbarukan dinilai menjadi solusi. ■ **man/sf**

(KUBE). “Peningkatan usaha apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki ekonomi melalui modal KUBE Rp 20 juta, nanti kita bicarakan,” imbuh Marwan.

Menanggapi kekhawatiran para pendamping PKH mengenai status sebagai pekerja sosial, Marwan menegaskan bahwa saat ini Komisi VIII DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Sosial. “Komisi VIII saat ini sedang menggodok RUU Pekerja Sosial. Kalau itu sudah selesai, maka status bapak dan ibu sebagai pekerja sosial akan jelas dan terlindungi,” komitmen legislator dapil Sumatera Utara itu.

Tidak ketinggalan, Marwan mendorong para pendamping PKH untuk dapat mensosialisasikan besarnya nilai yang didapat para penerima PKH kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kegaduhan. “Kenapa (besarannya) berbeda? Karena sasarannya berbeda. Mungkin saja di satu keluarga tidak memiliki anak yang bersekolah di SMA. Mungkin saja ada keluarga yang memiliki anak yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA, bahkan memiliki orang lanjut usia di keluarganya. Tentu lebih besar,” tegas Marwan. ■ **nds/eko/sf**

Antisipasi Kelangkaan BBM Harus Sinergis



Tim Kunjuran Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Kendari.

Anggota Komisi VII Ihwan Datu Adam mengungkapkan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus bisa diantisipasi secara baik oleh seluruh pihak, baik itu Pertamina, pemerintah daerah dan kepolisian.

Berdasarkan kejadian yang telah terjadi, kelangkaan itu disebabkan oleh adanya penimbunan BBM. Meskipun pasokan BBM di Sulawesi Tenggara (Sultra) aman, namun potensi kelangkaan tetap harus diwaspadai.

“Kelangkaan pasokan BBM di Sulawesi Tenggara itu aman, nanti kami akan cek ke lapangan. Kami berharap pemerintah daerah provinsi maupun kota dan kabupaten bahkan pihak kepolisian, kami minta supaya bisa membantu pengawasan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang sehari sudah habis misalnya,” ujar Ihwan Datu Adam saat kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, baru-baru ini.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar pelarangan pengisian BBM menggunakan jerigen secara berulang harus dilakukan, karena itu adalah salah

satu modus sebagai penimbun untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar dan dijual secara eceran.

“Karenanya Komisi VII selaku mitra dari Pertamina berupaya keras untuk melakukan pengawasan dan sidak guna memastikan ketersediaan BBM aman di Sulawesi Tenggara. Komisi VII juga memberikan ruang bagi Pertamina untuk terus menyampaikan aspirasi dan masukan guna penguatan Pertamina dan distribusi BBM,” jelasnya.

Tindakan preventif seharusnya bisa dilakukan bila ditemukan penimbunan BBM. Masyarakat juga diminta proaktif dalam menyampaikan kondisi terkini apabila terjadi upaya-upaya penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum. Jangan sampai masyarakat hanya mengeluhkan setelah terjadinya kelangkaan. ■ **hs/es**

“Karenanya Komisi VII selaku mitra dari Pertamina berupaya keras untuk melakukan pengawasan dan sidak guna memastikan ketersediaan BBM aman di Sulawesi Tenggara.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) untuk dapat menciptakan para calon tenaga kerja yang memiliki skill mumpuni dalam mengaplikasikan teknologi perindustrian.

Menurutnya saat ini penggunaan alat teknologi yang dimiliki BLK belum optimal dan belum terserap dengan baik, sehingga masih harus bergantung pada industri padat karya.

“Banyak masyarakat yang kemudian pergi ke kota untuk bekerja pada sektor-sektor industri, sehingga boleh dikatakan sektor industri yang terpakai justru yang padat karya. Hal ini tidak sebanding dengan peralatan yang disiapkan pemerintah untuk menunjang pelatihan yang diberikan kepada para calon tenaga kerja di BLK,” ujar Dede usai rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Sumedang di Kantor Bupati Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/2).

Untuk itu, Dede menginginkan agar sistem sejenis kurikulum yang diterapkan

Penggunaan Teknologi BLK Belum Optimal



Foto: Eilangga/rni

Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau BLK Sumedang.

Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Lokal



Foto: Singgih/rni

Tim Kunker Komisi X DPR RI berfoto bersama kepala sekolah dan guru SMKN 3 Kota Ambon

Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berharap pembangunan wilayah di luar Jawa seperti Indonesia bagian timur saat ini untuk lebih memfokuskan kepada kebutuhan masyarakat lokal.

Pembangunan wilayah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat lokal akan lebih mempermudah pembangunan itu berkembang.

“Kita mengunjungi SMKN 3 Kota Ambon, dan yang menjadi catatan bahwa pembangunan atau pengembangan itu tidak boleh sama rata. Kita harus melihat kebutuhan dan kemampuan lokal seperti apa. Dan kita dorong supaya para pelajar kita mendapatkan ilmu yang bisa langsung diterapkan,” ungkap Irine saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Maluku, Jumat (15/2).

Irine meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam membuat keputusan. Jangan hanya meniru daerah lain yang telah sukses, padahal setiap

di BLK sebaiknya mulai disesuaikan dengan kebutuhan di dalam dunia kerja terutama bidang industri yang sesuai dengan tujuan dari BLK itu sendiri. "Sementara di BLK juga sudah industri dengan teknologi tinggi yang diterapkan. Ini belum *link and match* antara kebutuhan industri dengan apa yang dilatih. Nah ini yang kita *perkenankan* bagaimana caranya agar yang terlatih itu terserap kepada industri yang membutuhkan," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Malik menjelaskan bahwa selama ini salah satu tujuan dari BLK adalah dapat menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan. Menurutnya hal ini harus dibarengi dengan kualitas para instruktur yang mumpuni sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal kepada para calon tenaga kerja.

"Tenaga kerja kita yang *skill* akademiknya atau sekolahnya kurang, ini bisa dilatih di BLK, untuk mendapatkan *skill* tambahan. Nah kalau instruktur kurang, tentu ini tidak akan maksimal bagi mereka. Makanya Komisi IX fokus untuk melihat bagaimana BLK ini dikembangkan dan dipertanggungjawabkan untuk bisa melatih tenaga kerja yang secara akademik skillnya kurang," pungkask Irma.

■ eps/sf

daerah memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk memajukan daerahnya. Menurutnya, semua daerah pada dasarnya *customized*. Jika pembangunan dan pengembangan disamaratakan, hasilnya akan berbeda.

"Misalnya seperti di SMKN 3 Kota Ambon, lakukanlah 70 persen teknologi yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan 30 persennya lagi sesuai dengan proyeksi ke depannya. Sehingga mereka ada transisi atau *upgrade* diri ketika akan keluar daerahnya," ungkap legislator PDI-Perjuangan itu.

Politisi dapil Maluku Utara itu mengingatkan, membangun Indonesia tidak bisa diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Harus ada pengklasteran setiap wilayah, sesuai dengan standar dan potensi daerahnya. "Kita harus menciptakan ekosistem pendidikan yang subur di daerah, tetapi juga kita mendorong ekosistem yang subur untuk pendidikan secara nasional," pesan Irine. ■ skr/sf(skr/sf)

Komisi XI Dorong Peningkatan Pengawasan Harga Komoditas



Foto: Gerai/irni
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mendorong peningkatan pengawasan harga komoditas. Sebab masalah perekonomian di Indonesia saat ini masih terkendala dengan fluktuatifnya harga komoditas di pasaran.

Menurutnya seperti Sumatera Utara ini yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar, sayangnya untuk hilirisasi sektor pertanian ini, dinilai belum sesuai dengan harapan.

Hal ini ia sampaikan seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Ia menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh faktor global sehingga industri saat ini juga menjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat.

"Ada kendala kita masih

menghadapi harga komoditas yang fluktuatif, ini yang membuat industrinya tidak sesuai seperti yang kita inginkan karena ini memang ada faktor-faktor global juga. Maka dari itu kita keliling ke Indonesia supaya mengetahui persoalan spesifik apa yang terjadi di setiap daerah itu berbeda-beda," ujar legislator PAN itu.

Hafisz menambahkan apabila kondisi ini terus berlangsung, maka lambat laun akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus stagnan. Oleh karena itu, melalui pertemuan dengan BI ini, ia meminta mitra kerja untuk lebih giat memicu pertumbuhan yang lebih tinggi seperti misalnya memberikan inkubator Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) seperti yang dilakukan dengan mitra kopi.

Menurutnya, jika hal tersebut berjalan maka cadangan devisa akan meningkat berlipat-lipat. Sehingga tidak perlu lagi ragu melakukan pembangunan di segala sektor karena modal sudah cukup. "Dari sisi transparansi keuangan kita saat ini sudah jauh lebih baik. Hanya saat ini ada dijumpai sejumlah kendala di dunia keuangan di Indonesia," tukas legislator dapil Sumatera Selatan itu.

■ opi/eps/sf

Ekonomi dan Pariwisata NTB Semakin Membaik

Perekonomian dan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu mulai kembali pulih. Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai, pertumbuhan ekonomi NTB semakin membaik pascagempa.

Ini disebabkan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat mempunyai motivasi dalam memulihkan perekonomian dan kesejahteraan NTB.

“Tumbuh kembang ekonomi NTB semakin membaik dibandingkan dengan nasional, tidak seperti sebelumnya. Ada perkembangan yang signifikan dan sangat berarti sekali untuk kemajuan NTB pasca gempa ini, dimana masyarakat dengan adanya dukungan dari pemerintah masyarakat sangat bermotivasi untuk mengembalikan dan memulihkan NTB,”

katanya Rai saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (14/02).

Upaya peningkatan perekonomian yang perlu dicermati dalam mendorong perekonomian NTB ke depan yaitu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan dampak gempa. Proses percepatan tersebut difokuskan pada pembangunan rumah hunian masyarakat, sarana pelayanan dasar, pembangunan kembali infrastruktur penunjang perekonomian seperti pasar, pertokoan, dan perhotelan.

Kemudian optimalisasi peluang NTB sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Sektor pariwisata ke depan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi NTB, dengan KEK Mandalika sebagai lokomotifnya. Optimalisasi tersebut perlu diiringi dengan promosi yang efektif dan masih untuk meyakinkan wisatawan bahwa situasi NTB sudah aman dan kondusif serta meningkatkan sumber



Foto: Agung/rni

Anggota Komisi XI DPR RI Gusti Agung Rai Wirajaya.

daya manusia yang bergerak di sektor pariwisata.

Selanjutnya peningkatan nilai tambah hasil sumber daya alam NTB. Kontribusi sektor pertanian dan pertambangan terhadap perekonomian NTB dapat dioptimalkan melalui hilirisasi, komoditas sektor pertanian dan mendorong sektor *agroindustry*, serta proses pembangunan fasilitas pemurnian hasil tambang (*smelter*) yang saat ini sedang berjalan, hal ini dapat mendorong sektor industri olahan Provinsi NTB. ■ **as/sf**

Legislator Usul Penerbangan Internasional Papua Barat - Palau



Foto: Emaran/rni

Anggota Komisi X DPR RI Jimmy Demianus Ijie

Anggota Komisi X DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengusulkan agar pemerintah membuka jalur transportasi internasional yang menghubungkan Papua Barat dengan Republik Palau.

Disampaikan Jimmy, Republik Palau merupakan salah satu negara oceania yang menjadi incaran para wisatawan. Di negara berpenduduk 21 ribu jiwa ini, tingkat kunjungan wisatawan pertahunnya mencapai 141 ribu pengunjung.

“Palau merupakan salah satu negara tetangga kami yang paling dekat dengan Raja Ampat. Kalau menggunakan kapal cepat, hanya 4 jam untuk sampai di ibu kota negara Palau itu. Bila sudah ada

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan banyak mendapat temuan terkait dengan ekonomi kreatif saat berkunjung ke Pasar Sentral Hamadi di Jayapura, Papua. Salah satunya adalah para pengrajin di Papua yang bukanlah berasal dari Papua.

Bahkan, ada sejumlah kerajinan khas Papua, tetapi datangnya dari luar daerah seperti dari Jawa dan Kalimantan.

Ia melihat pengrajin di Papua membutuhkan perhatian dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Pahatan-pahatan patung seperti patung Suku Asmat dan Suku Dani, memang berasal dari Papua, tetapi memproduksinya di Jawa. Ini sebenarnya perlu sentuhan dari Bekraf, yang saat ini menjadi tulang punggung dari bangsa kita untuk meningkatkan devisa negara,” kata Ayub saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Pasar Sentral Hamadi di Jayapura, Papua, Jumat (15/2).

Politisi Partai Demokrat ini melihat perlu adanya kerja sama dari

penerbangan internasional, dari Koror (kota terbesar di Republik Palau) ke Sorong hanya ditempuh dalam waktu 40 menit. Saya yakin bila dipenuhi, kunjungan wisatawan asing akan meningkat,” terang Jimmy.

Dari situlah menurut Jimmy akan ada celah dan ruang ruang bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendulang pendapatan dari sektor pariwisata. “Kalau itu pendekatannya tidak bisa dengan teori-teori, nanti begini, nanti begini, itu tidak bisa. Lakukan saja. Orang-orang Papua terampil kok,” tegas legislator dapil Papua Barat itu.

Ia menyarankan kepada Gubernur Papua Barat agar pemandu wisata yang ada di Raja Ampat kelak dikirim untuk studi banding ke Koror, Palau. Mengingat terdapat kesamaan budaya antara Palau dengan Papua Barat, namun penduduknya bisa menjaga kebersihan destinasi wisata, pantainya dirawat dengan baik, sehingga mendatangkan *income* yang besar bagi negaranya.

Gubernur Papua Barat agar pemandu wisata yang ada di Raja Ampat kelak dikirim untuk studi banding ke Koror, Palau. Mengingat terdapat kesamaan budaya antara Palau dengan Papua Barat, namun penduduknya bisa menjaga kebersihan destinasi wisata, pantainya dirawat dengan baik, sehingga mendatangkan *income* yang besar bagi negaranya.

“Harapan kami, begitu nanti ada penerbangan langsung dari Koror ke kota Sorong, saya yakin Raja Ampat, Tambraw, Teluk Wondama serta spot wisata yang ada di Papua Barat, akan dibanjiri pengunjung,” pungkas legislator Fraksi PDI Perjuangan ini. ■ **es/sf**

Pengrajin Papua Perlu Perhatian Bekraf



Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan saat mengunjungi Pasar Sentral Hamadi di Jayapura Papua

Foto: Chasby/rni

pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Papua. Menurutnya potensi yang luar biasa ini bisa diangkat untuk menarik wisatawan asing. “Pada dasarnya Papua sudah memiliki *branding*, hanya manajemennya yang perlu ditingkatkan dan harus dibantu oleh pemerintah pusat, yakni Bekraf,” jelasnya.

Ayub menilai, Papua adalah daerah yang cukup kaya, baik seninya maupun tradisinya. Potensi ini harus diangkat dan dipublikasikan ke publik. Pemerintah pusat harus membantu untuk merealisasikan hal tersebut. “Termasuk batik yang saya pakai ini, modelnya memang berasal dari Papua, tetapi untuk proses produksinya berasal dari Jawa,” kata Ayub.

Lebih lanjut Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur IV ini menjelaskan, perlu ada pendidikan khusus kepada masyarakat Papua terkait dengan batik, sehingga masyarakat Papua sendiri bisa membuat *image* Papua di daerahnya sendiri. Hal ini agar tidak ada lagi hasil batik model Papua yang produksinya dari daerah lain. ■ **cas/sf**

Minimnya Pelatihan Jadi Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menilai, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan minimnya pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa masih menjadi tantangan pengelolaan Dana Desa di sejumlah daerah.

Sehingga menurutnya, perlu adanya kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan pelatihan pengelolaan Dana Desa secara berkala kepada aparatur desa.

“Saat ini kita merasakan masih banyak yang perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa. Dan pemerintahan desa yang menjadi satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa ini memang terkait dengan SDM dalam hal pengawasan dan pemeriksaan,” kata Willgo usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (12/2).

Willgo memaparkan, BPK dengan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan, juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman literasi kepada aparatur desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pendampingan desa, agar tugas BPK lebih ringan. Sehingga verifikasi awal atau penyempurnaan administrasi bisa ditindaklanjuti di awal, dan tidak



Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar saat pertemuan dengan jajaran Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTB

menimbulkan kesulitan pada pemeriksaan yang setiap waktu jumlahnya akan semakin banyak.

Di sisi lain, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, juga masih ada kekurangan pada *human resources* yang dimiliki BPK RI, sehingga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa ini hanya dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa desa di sejumlah kabupaten. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena Dana

Desa ini dialokasikan kepada sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

“Sehingga mungkin ke depan, walaupun nanti ada pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh BPK, maka harus ada unit khusus dalam pemeriksaan pengawasan terkait Dana Desa dari BPK sendiri. Kalau saat ini mungkin tidak bisa merata, tapi bisa dari beberapa indikasi-indikasi atau beberapa sampel yang diambil,” pungkask Anggota Komisi XI DPR RI itu. ■ **ran/sf**

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengapresiasi capaian-capaian pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jateng, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2018 tumbuh menjadi 5,32 persen, serta menurunnya angka kemiskinan 2018 menjadi 11,32 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jateng Diapresiasi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melaporkan, capaian-capaian pembangunan di Jateng cukup mengembirakan.

“Penurunan angka kemiskinan mengalami penurunan. Bahkan angka kemiskinannya turun luar biasa,” kata Hendrawan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi

XI DPR RI dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kanwil Kementerian Keuangan Jateng, BPK Perwakilan Jateng, Perwakilan BPKP Jateng, dan BPS Jateng, di Semarang, Jateng, Kamis (14/2).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jateng yang telah

Badan Keahlian (BK) DPR RI mengimplementasikan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* penyusunan peraturan perundang-undangan.

BK DPR Perkuat Kerja Sama Penyusunan Legislasi

Plt. Kepala BK DPR RI, sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, FGD ini juga menjadi momentum BK DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Hal itu diungkapkan Indra saat memberikan sambutan pada FGD dengan tema “Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pertanahan” di Gedung Fakultas Hukum UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/2). FGD ini menghadirkan narasumber utama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron (F-Demokrat).

“Kami bekerjasama dengan UGM dalam kaitan menyerap berbagai masukan berkaitan dengan penyusunan undang-undang, dan produk-produk hukum DPR RI. Tentunya UGM ini kami anggap sebagai representasi dari masyarakat, karena mereka juga hadir dari lembaga-lembaga penelitian,” kata Indra.

Selain menerima masukan, lanjut Indra, diharapkan dengan adanya FGD ini dapat mempercepat pembahasan produk legislasi yang dihasilkan DPR RI. Ia yakin, saat ini DPR RI semakin terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh kalangan masyarakat.



Plt. Kepala BK DPR RI, Indra Iskandar memberikan sambutan saat acara FGD dengan tema “Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pertanahan”

Foto: Andri/rni

“DPR kan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Jadi kerja sama ini, universitas memberikan masukan dan kritikan yang sangat membantu dalam proses merancang UU dan produk hukum DPR RI. Masukan dan kritik kepada kami itu menjadikan DPR RI lebih baik,”

Hal ini juga dukungan untuk mengimplementasikan konsep Parlemen Modern.

“DPR kan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Jadi kerja sama ini, universitas memberikan masukan dan kritikan yang sangat membantu dalam proses merancang UU dan produk hukum DPR RI. Masukan dan kritik kepada kami itu menjadikan DPR RI lebih baik,” pungkas Indra.

■ man/sf



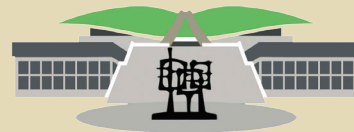
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno bersama Gubernur Jawa Tengah

memiliki sistem informasi harga komoditi (Sihati), khususnya untuk memonitoring harga-harga komoditas yang sering menjadi pemicu naiknya angka inflasi demi menjaga kestabilan harga komoditas di Jateng.

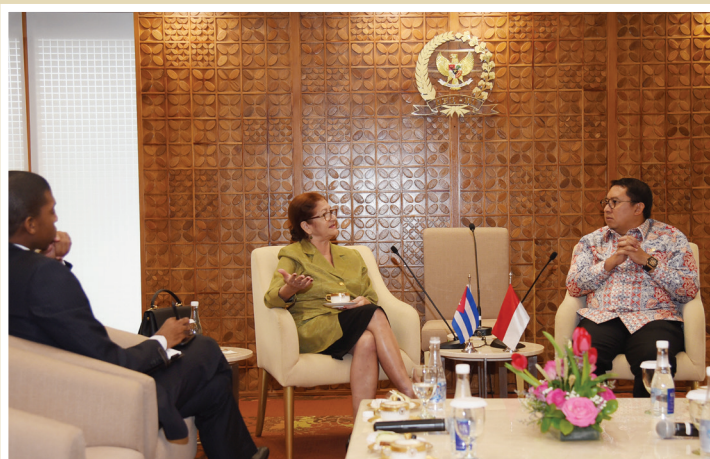
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga mendukung penuh tumbuh kembang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Jateng untuk terus meningkatkan kualitas produk. Mengingat 30 persen kontribusi sektor manufaktur merupakan dari produksi domestik regional bruto.

“Jawa tengah salah satu provinsi yang menjadi pusat berkembangnya UMKM. Itu sebabnya kontribusi sektor manufaktur 30 persen dari produksi domestik regional bruto. Itu harus didorong agar sektor manufaktur berkembang dan produsen dapat menciptakan produk yang nilai tambah tinggi,” tutup Hendrawan.

■ qq/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin prosesi upacara persemayaman jenazah Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mardian Umar. Foto: Kresno Iod



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirسيا Castro Guevara, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (26/2). Foto: Gerald/rni



Pertemuan membahas hubungan kerja sama Indonesia dengan Jerman, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2). Foto: Kresno/rni

